

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana implementasi bisa di artikan penerapan.

Dasar Dari Implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.”(Naditya dkk: 2013).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.(Mulyadi, 2015)

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana atau tersusun yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya implementasi merupakan aktivitas atau usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana yang telah di rumuskan

dan ditetapkan secara matang dan terperinci dengan di lengkapi segala kebutuhan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha yang dilakukan dan di dukung oleh alat-alat penunjang.

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan terjemahan langsung dari kata bahasa Inggris, yaitu *Management*. *Management* berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda terkait dengan pengertian manajemen. Di antaranya:

Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu (Kristana Widyaningrum,2019)

Malayu S.P. Hasibuan (2014:2) menerapkan bahwa manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Muhammad Rifa'I (2018:5) menyebutkan bahwa manajemen menyangkut beberapa hal pokok antara lain: 1) manajemen menekankan adanya kerjasama antara unsur dalam organisasi; 2) adanya usaha pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki organisasi; dan 3) adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai.

Menurut Hersey, *management is a process of working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals* (Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi).

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki melalui kerja sama para anggota dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

b. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan semua pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang di cita-citakan tercapai secara efektif dan efisien, yang harus terus di gali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien.(Matin, 2014).

Biaya pendidikan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk krlancaran proses pendidikan.(Dadang Suhardan,2012)

Agus Irianto (2011:61) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Terry, 2013), juga menyatakan bahwa *“management is the accomplishing of a predeternined objectives through the efforts of other people”*, manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.

Dari pendapat ahli di atas Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah seluruh dana yang diperoleh dan di belanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa yang telah ditetapkan pihak

lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

Budaya (2017) menjelaskan bahwa proses pengelolaan pembiayaan sekolah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, supervisi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan adalah langkah pertama dalam proses manajemen pembiayaan. Perencanaan merupakan proses rasional dan sistematis dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa dalam perencanaan terdapat proses, terdapat kegiatan yang rasional dan sistematis serta terdapat tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu peristiwa membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara tiba-tiba. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan keseluruhan rencana pengembangan sekolah, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang

Kemudian penjelasan di atas dapat di satukan membentuk pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Sebelumnya beberapa ahli telah memberikan definisinya mengenai pengertian manajemen pembiayaan pendidikan, seperti Matin yang menyatakan bahwa manajemen pembiayaan terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi berikut pertanggung jawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran.

Muhammad (Rifa'I 2019:36) menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu aktivitas lembaga, organisasi atau perusahaan berhubungan dengan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.

Manajemen keuangan sekolah merupakan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah, keuangan tersebut meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pembukuan, pelaksanaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban (Zakky, 2018)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan bertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukan selama menggunakan dana yang diperoleh untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa dengan memanfaatkan kemampuan dari staf penanggung jawab keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, keberadaan biaya dalam suatu organisasi merupakan suatu sektor yang sangat penting keberadaannya, dalam hal menunjang segala kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Apalagi dalam dunia pendidikan, biaya merupakan komponen yang sangat penting dalam proses

penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang dijalankan di sekolah. Baik di kategori mikro maupun makro. Sebagus apapun program yang telah direncanakan di sekolah tanpa biaya tidak akan berhasil. Program yang terencana dengan baik dapat terabaikan jika tidak didukung oleh biaya yang memadai karena biaya merupakan alat yang digunakan untuk mendukung proses suatu kegiatan. Segala hal yang berkaitan dengan proses kegiatan yang akan dilaksanakan tidak lepas dari biaya.

Anggaran pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang saling berhubungan, yaitu sisi anggaran pendapatan dan sisi anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah pendapatan yang diterima setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara berkala. Misalnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran belanja adalah jumlah uang yang dikeluarkan setiap tahun untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berupa tindakan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada lembaga pendidikan.(Rusmawati,2013)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah proses memperoleh dan mengelola pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya

manusia melalui fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan, untuk membiayai segala kegiatan. atau kegiatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan guna mencapai mutu pendidikan yang diharapkan.

Jika di kaitkan dalam perspektif Islam, maka manajemen pembiayaan pendidikan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT surah Al-Mujadilah/58 ayat 12-13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jikaa kamu tidak memperoleh (yang akan disedehkankan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakaah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan rasul? Tetapi jikaa kaamu tiada melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laaksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang konsep pembiayaan pendidikan dalam Islam. Dan sekaligus memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis. Bahkan dalam satu riwayat berkaitan dengan turunnya ayat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan itu jangan terlalu murah. Dalam ayat ini Allah SWT. Memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar)

kepada Rasulullah SAW. Untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa diasumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.

Tujuan yang paling utama dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik adalah untuk menunjang kelancaran berlangsungnya proses belajar mengajar. Di samping itu, dana pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik bertujuan untuk mengikat para peserta didik agar mereka belajar secara sungguh-sungguh, dengan asumsi bahwa mereka akan merasa rugi apabila tidak belajar sungguh-sungguh setelah mereka mengeluarkan biaya yang harus mereka bayar.

Ayat selanjutnya memberikan pelajaran khususnya bagi mereka yang memangku tanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam ayat ini Allah SWT. Memberikan keringanan pada kaum muslimin yang ingin bertanya (belajar) kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mampu untuk memberi sedekah kepada fakir miskin, maka Allah memberikan keringanan berupa pengganti kewajiban dengan mendirikan shalat, atau membayar zakat dan ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya.

Secara umum, lembaga pendidikan memberlakukan biaya pendidikan berupa sejumlah uang. Bahkan dalam beberapa kasus,

banyak lembaga pendidikan yang tidak menerima calon siswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan (padahal secara intelektual mereka mampu). Ataupun kasus lainnya adalah beberapa sekolah mengeluarkan siswanya karena tidak mampu membayar SPP atau uang ujian. Kalau berkaca dari ayat 13 di atas, memberikan gambaran bahwa ketika seorang siswa tidak mampu membayar biaya pendidikan, maka mereka berhak untuk membayar dengan bentuk lain. Bisa berupa bentuk materi ataupun jasa yang lain, seperti membayar dengan hasil pertanian, ladang ataupun berupa j

3. Sumber Biaya Pendidikan

(Sujari Rahmanto 2019:79-81) menjelaskan bahwa sumber-sumber keuangan sekolah diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

a. Sumber dana dari pemerintah pusat dan daerah

Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu juga terdapat bantuan dana berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah di tentukan jumlahnya berdasarkan pada karakteristik siswa dan jenjang pendidikannya.

Dana dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten/kota. Dana

dari APBD di gunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan.

b. Sumber dana dari orang tua/wali murid

Pemasukan bersumber dari orang tua siswa di sebut iuran komite. Besarnya biaya yang di keluarkan oleh orang tua wali/murid di tetapkan kesepakatan komite sekolah, biasanya dana komite meliputi:

- 1) Dana tetap bulanan sebagai uang kontribusi yang harus di bayar oleh orang tua setiap bulan selamaa anaknya menjadi siswa di sekolah.
- 2) Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama 3 tahun menjadi siswa (pembayaran dapat di angsur).
- 3) Dana sukarela yang biasanya di tawarkan kepada orang tua siswa tentunya yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpaikatan apapun.

c. Sumber dana dari masyarakat

Dana tersebut kebanyakan berupa donasi tak terikat/sukarela dari warga masyarakat yang memperhatikan terhadap program pendidikan pada sekolah tertentu. Hal ini disebabkan adanya simpati untuk dapat memberikan bantuan demi pendidikan yang lebih maju. Baik dana itu di sumbangkan oleh individu, kelompok, badan usaha, atau yayasan tertentu.

d. Sumber dana dari lulusan

Bantuan alumni bukan selalu dalam bentuk uang, bisa berupa perlengkapan pembelajaran, buku, atau alat yang dapat menunjang peningkatan kualitas lembaga. Dan bantuan yang berupa dana dikumpulkan dari alumni-alumni bersifat bantuan tak mengikat/sukarela dari alumni yang tergerak berpartisipasi memajukan dan mengembangkan pendidikan di sekolah. Dana tersebut bisa diterima dari alumni secara langsung ataupun melalui even/program tertentu.

e. Sumber dana dari anggota kegiatan

Dana ini diperoleh dari siswa/masyarakat yang mengikuti layanan program pendidikan ekstrakurikuler, contohnya: les bahasa inggris, pelatihan komputer dan bidang keterampilan lainnya.

f. Sumber dana dari kegiatan wirausaha lembaga pendidikan

Terdapat sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program usaha yang bertujuan untuk menambah pemasukan. Dana tersebut adalah hasil dari setiap program wirausaha yang di kelola oleh sekolah melalui tenaga karyawan sekolah ataupun para murid sendiri. Contohnya: kantin, print dan foto copy, koperasi, even, bazar, dll.

4. Prinsip-prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public. Berikut akan di bahas masing-masing prinsip tersebut,yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

a) Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, maksud dari transparansi adalah keterbukaan mengenai segala sumber keuangan serta jumlahnya, rincian penggunaannya, dan yang terpenting adalah pertanggungjawaban yang jelas.

Adanya transparansi dalam mengelola pembiayaan pendidikan akan lebih meningkatkan kepercayaan semua pihak terutama wali siswa ataupun masyarakat. Bentuk dari prinsip transparansi bisa dilakukan dengan cara menempelkan segala informasi keuangan sekolah di papan pengumuman sekolah.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ada tiga persyaratan terbangunnya akuntabilitas:

- 1) Adanya transparansi:
- 2) Adanya kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya:
- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

c. efektivitas

Menurut (Asnawi,2013) Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dikatakan efektif jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.

d. efisiensi

Efisiensi menekankan pada hasil kegiatan, "*Efficiency characterized by quantitative outputs.*" Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara

daya dan hasil. Daya yang di maksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. (Fauzan,2016)

2.2 Jenis Biaya Pendidikan

Menurut (Supandi 2015:265), jenis biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat yaitu, biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta biaya pribadi dan biaya social.

a. Biaya langsung (*direct cost*) ialah biaya yang langsung digunakan untuk operasional sekolah. Biaya langsung terdiri atas biaya pembangunan (*capital cost*) dan biaya rutin (*recurrent cost*). Biaya pembangunan ialah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah bagi pembangunan ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan olahraga, biaya konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan membel, biaya penggantian, dan perbaikan. Untuk menentukan biaya pembangunan digunakan konsep “*capital cost per student place*”. Adapun biaya rutin ialah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, seperti untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personel sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Untuk menghitung biaya rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun di sekolah digunakan analisis unit cost. Nilai unit cost merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada seorang siswa per tahun dalam suatu jenjang pendidikan. *Unit cost* memberikan gambaran tentang besar

biaya yang dikeluarkan dan tingkat pelayanan yang diberikan.
(Sonedi et al., 2017)

b. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) ialah biaya yang menunjang siswa untuk dapat hadir di sekolah. Biaya tersebut meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya lainnya. Biaya tidak langsung sulit dihitung karena tidak ada catatan resmi. Berdasarkan alasan praktis, biaya ini tidak turut dihitung dalam perencanaan oleh para administrator perencana atau pembuat keputusan

a) Biaya pribadi, Biaya pribadi (*privat cost*) merupakan merupakan biaya yang dikeluarga atau wali murid untuk pendidikan anak mereka. biaya pribadi (*private cost*) juga dikenal dengan sebutan pengeluaran rumah tangga. Perbedaan besaran biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*) berdasarkan bantuan atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap lembaga pendidikan. Dikatakan deminikian karena, di beberapa negara ada yang mempunyai kebijakan untuk menggratiskan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah, sehingga biaya pribadi (*privat cost*) hanya dikeluarkan untuk membeli buku biaya transportasi dan juga seragam (Fatah, 2017).

b) Biaya sosial (*Social cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun organisasi untuk

membiyai segala kebutuhan belajar. Biaya ini dikeluarkan oleh masyarakat sebagai wujud partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan orangtua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, orangtua dan masyarakat. Biaya dari masyarakat di Indonesia sebelum anggaran pendidikan sebesar 20 persen, pernah dikeluarkan melalui BP3 dan melalui komite sekolah. Namun sekarang untuk pendidikan dasar (SD dan SMP) pemerintah melarang adanya biaya tambahan selain yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengingat besarnya anggaran pendidikan 20 persen telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan karena biaya ini berasal dari pajak yang dipungut pemerintah untuk pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan pendidikan.

- c) Biaya moneter (*Monetary cost*) merupakan biaya yang dihitung berdasarkan nilai keuangan. Pengeluaran yang dimanifestasikan berupa uang, baik berupa biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*) kedua biaya tersebut juga termasuk dalam biaya moneter.
- d) Biaya non moneter (*non monetary cost*) merupakan biaya yang tidak diwujudkan dalam bentuk nominal (uang) di

sekolah, biaya non moneter meliputi pendapatan yang hilang dan peluang (*opportunity*) yang dikaitkan pada alokasi waktu.

2.3 Perencanaan

Proses perencanaan merupakan langkah awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan di lakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Menurut Minarti, pada tahap perencanaan analisis kebutuhan pengembangan sekolah dalam kurun waktu tertentu menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan. Kebutuhan dalam satu tahun anggaran, lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahun. (Sri Minarti, 2011).

Garth n. Jone mendefinisikan perencanaan sebagai berikut *planning is the procces of selecting and developing the best course of action to accomplish an objective* (perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik/menguntungkan untuk mencapai tujuan). Sedangkan menurut Muhammad Rifa'I perencanaan adalah proses menentukan tindakan apa yang harus di lakukan dan bagaimana supaya rencana tersebut direalisasikan. (Muhammad Rifa'I, 2013)

B. Suryosubroto menjelaskan perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternative tentang pendapatan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang di maksud dengan sumber meliputi sumber manusia, material, uang dan waktu. Sedangkan Sutisna dalam Mesiono mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan seperangkat putusan bagi perbuatan di masa yang akan datang. (B. Suryosubroto, 2010)

Perencanaan dianggap penting karena akan menentukan dan sekaligus memberikan arahan pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian suatu pekerjaan akan menjadi berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang, perencanaan yang matang dan tertata dengan baik akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Penjelasan tersebut semakin menguatkan alasan posisi strategis perencanaan dalam suatu lembaga bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang (Aisyah, 2018).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iskandar, 2019), perencanaan adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi semua kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Perencanaan keuangan sekolah adalah perencanaan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah dengan cara menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan anggaran sebagai uraian suatu rencana dalam bentuk proposal untuk setiap komponen kegiatan. Jadi perencanaan adalah penentuan semua fungsi seorang manajer yang berkaitan dengan pemilihan tujuan, kebijakan, prosedur, program dari alternatif yang ada sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah penyusunan dan pemilihan berbagai alternative keputusan yang akan

dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan dalam kaitannya dengan pembiayaan ialah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan sejumlah tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu perencanaan ke dalam bentuk dana untuk setiap komponem pendidikan. Yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan keuangan sekolah antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dari berbagai sumber pendapatan (Abubakar, 2012)

Perencanaan merupakan alat untuk menganalisis segala kebutuhan sekolah baik itu satu tahun maupun berpuluh tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu adanya skala prioritas terhadap kebutuhan sekolah dan perlu memperhatikan kembali akan tersedianya waktu, tenaga, dan jumlah dana yang tersedia secara komprehensif.

Manajemen pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Landasan dasar dalam pembuatan RAPBS meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran. Perencanaan pembiayaan pendidikan atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaanya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan. Dimana

sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua/wali peserta didik. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana di padukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana.(Abuddin Nata,2013)

Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah dan bawahannya secara bersama-sama ikut berperan. Hal ini di lakukan untuk memastikan agar pendapatan dan pengeluaran yang akaan dijalankan sesuai rencana dapat di sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

Dalam suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin akan mendapatkan seseorang sebagai bendahara yang di percayai mampu diberi amanah dalaam mengelola keuangan sekolah. Selain melibatkan kepala sekolah bendahara, dan staf lainnya, dalam penyusunan RAPBS juga perlu didukung oleh keahlian dalam bidang akuntansi/peembukaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi segala pengeluaran dan pemasukan biaya yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

Berkaitan dengan hal di atas, Nanang Fattah mengemukakan prinsip dalam perencanaan anggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi
2. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran
3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
4. Adanya dukungan dari pelaksanaan mulai dari tingkat ata sampai yang paling bawah.

Dari prinsip di atas dapat dikatakan bahwa penyusunan anggaran melibatkan beberapa sumber daya manusia dalam perencanaannya. Proses pengorganisasian tugas dan wewenang masing-masing sumber daya manusia menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga lingkungan kerja dapat berjalan dengan optimal seperti pembagian wewenang dari kepala sekolah ke wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Di sisi lain, dukungan akuntansi / pembukuan sangat dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui semua pengeluaran atau biaya inklusi yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang tertuang dalam format baku RAPBS. Pengembangan organisasi juga dapat ditingkatkan melalui analisis dan penelitian yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi organisasi dalam mengatasi berbagai kendala. Semua komponen tersebut juga perlu didukung oleh seluruh sumber daya manusia yang ada, agar komitmen bersama dalam pencapaian tujuan organisasi dapat teraksana.

Perencanaan keuangan pada lembaga pendidikan setidaknya mencakup dua kegiatan, yaitu penganggaran dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penganggaran dijelaskan dalam bentuk kuantitatif untuk menentukan kebutuhan dan rincian anggaran untuk setiap item kegiatan, sedangkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menjadi dasar penyusunannya meliputi sumber pendapatan dan belanja. Dengan demikian, selain mencakup rincian dana yang dibutuhkan, sumber pendapatan dan

program kerja yang hendak dilaksanakan juga harus dideskripsikan secara jelas.

Manfaat perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Sebagai alat penaksir
- 2) Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana
- 3) Sebagai alat efisiensi, yaitu dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan.

Adapun penyusunan anggaran pembiayaan berbasis sekolah atau yang sering disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Mulyasa menjelaskan (Mulyasa, 2010) dalam uraian berikut:

- a. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pembiayaan. Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga pendidikan yang juga dapat menentukan satuan biaya untuk setiap kegiatan.
- b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Proses penyusunan RAPBS pada umumnya dilakukan secara bertahap dengan prosedur sebagai berikut:

1) Pada tingkat kelompok, kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

2) Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah Kerjasama antara komite sekolah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan pembiayaan sekolah, maka yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan administrative.

Pihak madrasah harus mempunyai rencana dari mana akan diperoleh biaya untuk melaksanakan proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang sedang berjalan di sekolah. Selain itu, segala hal yang menyangkut pengembangan kualitas sumber daya manusia baik pada kategori formal maupun non formal yang dijalankan di sekolah harus mendapatkan Dukungan berupa moril atau materil. Sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Setelah pendapatan biaya diperoleh dari berbagai pihak, selanjutnya direncanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan/program yang akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Dengan biaya yang di peroleh, sekolah dapat membuat berbagai program kegiatan yang akan membantu dalam meningkatkan kualitas dari peserta didik di lembaga pendidikan tersebut, baik di bidang akademik maupun non akademik. Hal ini juga akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah dan masyarakat.

2.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam KBBI, pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana yang berarti perbuatan. Pelaksanaan disebut juga gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan pemimpin untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan tercapai. (Terry, 2013)

Sebelum membahas tentang pelaksanaan anggaran pendidikan, ada baiknya jika membahas sumber keuangan yang biasa sekolah terima. Menurut Nanang Fattah, sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.

Selanjutnya, menurut Minarti pelaksanaan pembiayaan pendidikan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dimana seluruh sumber daya yang ada perlu dikelola secara terpadu.

Dengan kata lain, pelaksanaan harus di lakukan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat agar dapat mengelola ssegala sumber daya

secara terpadu, serta tidak ada satu kegiatan ataupun kebutuhan yang tidak bermanfaat untuk meningkatkan mutu sekolah.

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah pembukuan (*accounting*). Dalam UU No.28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. (UU RINo.28 Tahun 2007)

Pelaksanaan keuangan sekolah secara garis besar dikelompokkan dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran. (Mulyasa, 2009)

1. Penerimaan

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintahan:

2. Pengeluaran

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas.

Biaya yang diperoleh baik dari pemerintah maupun masyarakat harus digunakan secara efektif dan efisien. Pengeluaran yang dilakukan harus

sesuai dengan perencanaan pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas peserta didik.

Segala pengeluaran dalam pembiayaan pendidikan tidak hanya terbatas pada kegiatan yang formal saja seperti kegiatan belajar mengajar (KBM), melainkan juga untuk kegiatan informal seperti ekstrakurikuler. Karena peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga untuk mengembangkannya juga dengan cara yang berbeda-beda. Peserta didik yang memiliki potensi dalam bidang akademik, dalam mengembangkan potensinya bisa melalui KBM. Sedangkan bagi siswa yang memiliki potensi dalam bidang non akademik, pengembangan peserta didik dapat dilakukan melalui ekstrakurikuler.

Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran tersebut harus dicatat dalam pembukuan, tujuan dilakukannya pembukuan tersebut adalah supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat harus disajikan dengan sejelas mungkin agar tidak terjadi kekeliruan.

Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah memadukan antara pemerintah pusat dan pihak sekolah. Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak bisa dirubah oleh pihak sekolah dalam hal pengalokasian anggaran. Pihak sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna. Berbeda halnya dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS), dimana pihak sekolah memiliki wewenang dan keleluasaan untuk mengelola dana dalam mencapai efektifitas tujuan sekolah.

Hal yang menyangkut dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan.(Mulyasa,2007)

1. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan dan pengeluaran anggaran.
2. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan
3. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah sebagai pejabat otorisator sekaligus dilimpahi tugas ordonator. Kepala sekolah sebagai administrator harus melakukan pengembangan administrasi untuk memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Kepala Madrasah juga berwenang dalam penggunaan dana, yang kemudian untuk urusan pembuatan laporan akan diserahkan pada bendahara untuk nanti dipertanggungjawabkan.

2.5 Pengawasan

Dalam penelitian (Gamar, 2019) menjelaskan bahwa pengawasan pembiayaan pendidikan itu ditugaskan pada tim khusus yang bertugas mengawasi dan mengontrol keuangan. Tim yang terlibat dalam pengawas anggaran adalah masyarakat, seperti orang tua siswa, humas, kepala sekolah. Jadi pengawasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengontrol dan mengawasi keuangan oleh orang yang terlibat langsung, dalam hal ini orang yang terlibat langsung adalah orang tua siswa, kepala sekolah, tim kabupaten.

Pengawasan merupakan merupakan proses memantau berbagai program lembaga. Tujuannya untuk menetapkan tujuan yang dapat diwujudkan secara nyata dan memperbaiki semua penyimpangan. Pengawasan diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber dana yang tersedia.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau pelaksanaan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.

Jika dikaitkan dengan pembiayaan pendidikan di sekolah, pengawasan merupakan proses untuk memantau segala pengelolaan pembiayaan di sekolah apakah telah dialokasikan dan dimanfaatkan dengan efektif dan efisien dalam program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan lembaga pendidikan.

Konsep dasar tentang pengawasan anggaran memiliki tujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan pada tahap tingkat penggunaannya. Dengan adanya pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber- sumber dana yang ada. Disisi lain menghindari adanya pemborosan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, segala biaya yang dipergunakan harus mempunyai dampak yang signifikan dalam perkembangan sumber daya manusianya

Dalam kebijakan umum pengawsan departemen pendidikan dan kebudayaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut:

1. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program bidang organisai.
2. Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawas dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi.
3. Kegiatan pengawaan hendaknya lebih diarahkan pada bisang-bidang yang strategis dan bisa memperhatikan aspek manajemen.
4. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.

5. Kegiatan pengawasan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.
6. Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data atau informasi yang sangat tinggi.
7. Tepat waktu, artinya data yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan.
8. Objektif dan komprehensif
9. Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi
10. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat.
11. Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dengan adanya sistem yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut, maka akan mempermudah dalam melakukan pengawasan. Sistem pengawasan diatas dapat dijadikan acuan bagi pihak pengawas dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran oleh pihak lembaga pendidikan.

T. Hani Handoko yang menyatakan bahwa terdapat tiga tipe dasar pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan umpan balik.

1. Pengawasan Pendahuluan, pengawasan pendahuluan ini dapat diterapkan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang

kemungkinan muncul dan menyimpang dari tujuan awal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah sebelum kegiatan pendayagunaan anggaran selesai dilaksanakan. Pengawasan ini mengharuskan pihak sekolah untuk lebih aktif dan agresif atau peka, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah yang berkenaan dengan masalah anggaran itu terjadi.

2. Pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan, pengawasan ini dilakukan disaat kegiatan sedang berlangsung, disaat melihat penyimpangan terjadi maka pihak sekolah langsung berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
3. Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil dari kegiatan penganggaran yang telah dilaksanakan.

Dalam melakukan pengawasan, tidak hanya dilakukan pada saat awal pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan saja, melainkan juga bisa dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan sedang berjalan.

Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu :

1. Penetapan standar atau patokan yang digunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.
2. Mengukur dan membandingkan .
3. Mengidentifikasi penyimpangan.
4. Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi

Tahapan pengawasan dalam suatu anggaran tidak hanya sebatas pada berjalan atau tidaknya rencana yang ditetapkan pada awalnya. Akan tetapi harus melihat pada tiga aspek, yaitu kuantitas, kualitas biaya dan waktu. Proses pengawasan kegiatan yang telah dilakukan akan memperlihatkan apakah terjadi peningkatan kualitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya atau tidak dalam pencapaian tujuannya.

2.6 Penelitian Relevan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, telah ada beberapa penelitian sejenis tetapi berbeda dalam sudut pandang dan kajiannya, berikut penelitian terdahulu yang dapat di dokumentasikan:

1. Skripsi Fahrin Latif Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari 2017 dengan judul “Implementasi Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SD Negeri Padei Kec Menui Kepulauan Kab Morowali”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Proses Pelayanan Manajemen Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan terdiri dari Sumber Daya Manusia, antara lain:(Peningkatan Profesionalisme tenaga pendidik dan Kependidikan serta pelayanan proses pembelajaran kepada siswa dan pengelolaan sumber dana, pembenahan sumber daya kurikulum, pembenahan sarana dan prasarana dan penerapan budaya mutu).
2. Wahdana Fadila, 2018. Skripsi. Dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pembelajaran di MTs. Islamiyah Suluh. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pembiayaan anggaran untuk kegiatan sarana dan prasarana ya di alokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarannya pembelajaran di MTs Islamiyah Suluh berada dalam kategori cukup. 2) Penggunaan dana yang dikeluarkan dari pemerintah terutama khususnya untuk pemeliharaan sarana prasarana, gaji guru, dan pembangunan gedung sudah optimal. 3) Evaluasi sejauh ini sudah cukup transparan dalam pembiayaan pemeliharaan sarana prasarana yang ada namun segi pemeliharaan sarana dan prasarannya banyak peralatan-peralatan berbasis elektronik dan teknologi biasanya memiliki usia dan dapat kedaluwarsa, sehingga pada kurun waktu tertentu sebaiknya dilakukan penggantian.

Berdasarkan kajian dari hasil penelitian di atas, dapat disarikan bahwa keduanya memiliki pemaparan berbeda-beda terkait dengan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian pertama, hasil penelitiannya menekankan pada Implementasi Manajemen kepala sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Sedangkan pada penelitian ke dua hasil penelitiannya menekankan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

Melihat hasil penelitian sebelumnya, penulis perlu memaksimalkan fungsi manajemen mencakup menjadi satu dalam implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penelitian baru yang berjudul Implementasi

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs. Darul Ulum yang sifatnya akan melengkapi penelitian sebelumnya dan pembaharuan

